



RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN MUARA ENIM

TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmatnya sehingga tersusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 – 2026

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim. dan sesuai dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 memuat keseluruhan kebijakan publik sektor pariwisata yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2024-2026

Secara rinci RENSTRA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing masing bidang urusan di lingkungan dinas. Dari telaahan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2024-2026. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Bidang Pemasaran, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, selanjutnya disusun program program pembangunan, dan berbagai kegiatandengan indikatif pendanaan.

RENSTRA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 - 2026 juga dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit di lingkungan dinas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2024-2026 yang secara substansi sejalan dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.

Muara Enim, Januari 2024
KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN MUARA ENIM



ISDRIN. ST

Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 196909141996032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.2.1. Sumber Daya Manusia	9
2.2.2. Sarana dan Prasarana	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	18
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga	31
3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup	38
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	39

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	41
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII	PENUTUP	
	8.1. KESIMPULAN	69
	8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan juga melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk : (1) Menjami adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk minimalis resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim harus memiliki keterkaitan dengan perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim karena Renstra merupakan pedomandalam perumusan Renja Tahunan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Mas Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
16. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim di daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memperjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan, sasaran yang hendak dicapai, indicator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

a. Kepala

Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- 3) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Destinasi dan industri Pariwisata

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
3. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
4. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan wisata dan pengembangan industri pariwisata;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
6. pelaksanaan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata dan ;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

d. Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidanga strategi dan komoniksasi pemasaran pariwisata, analisis data pasar pemasaran pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri. Dalam menyelenggarakan tugas bidang pemasaran pariwisata mempunyai mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pemasaran pariwisata;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata (strategi dan komonikasi pemasaran pariwisata pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri);
3. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata (strategi dan komonikasi pemasaran pariwisata, analisis data pasar pemasaran pariwisata, pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri);
4. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata (strategi dan komonikasi pemasaran pariwisata, analisis data pasar pemasaran pariwisata, pengembangan Pemasaran pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri);
5. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemasaran pariwisata (strategi dan komonikasi pemasaran pariwisata, analisis data pasar pemasaran pariwisata, pengembangan pemasran pariwisata dalam dan luar negeri);
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan ekonomi kreatif mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

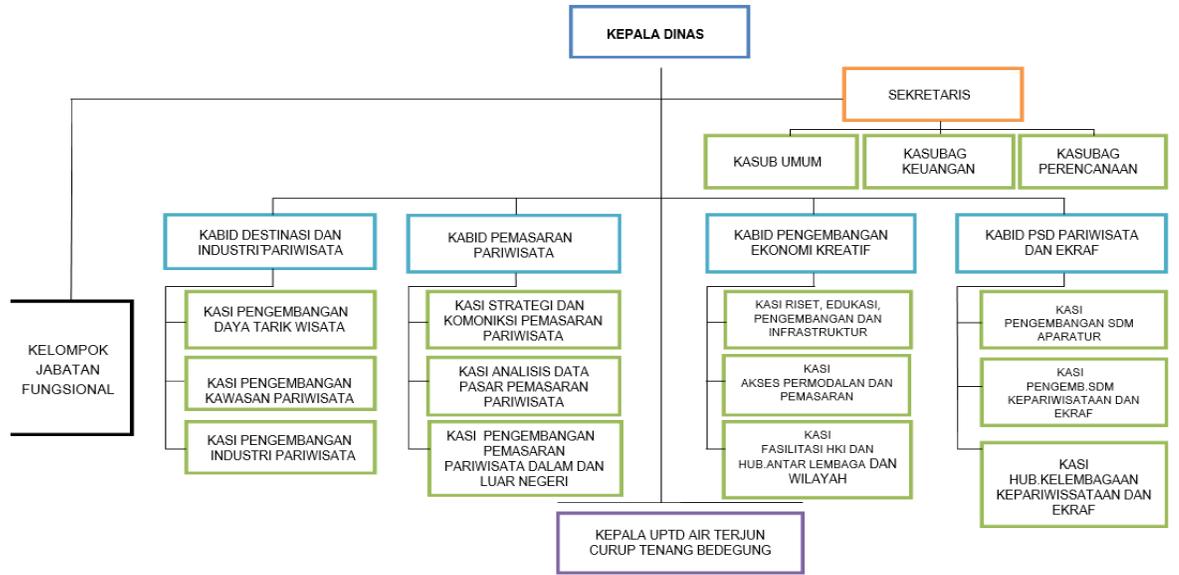
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan SDM aparatur, pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. pelaksanaan petunjuk teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang pengembangan sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dapat dilihat sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KABUPATEN MUARA ENIM



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Januari 2023, Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kabupaten Muara Enim sebanyak 24 orang PNS. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan kepegawaian, Pendidikan, peta jabatan dan menurut kelompok umur, PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan/Eselon	Unit		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi/ Eselon II	1	-	1
2	Jabatan Administrator / Eselon III	2	3	5
3	Jabatan Pengawas / Eselon IV	-	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	6	5	11
5	Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana (Staf)	3	3	6
TOTAL				24

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 24 orang PNS di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim
Menurut Golongan Kepegawaian

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-		7	2	9
2	Bidang Destinasi	-	1	2	1	4
3	Bidang Pemasaran	-	-	4	-	4
4	Bidang Peng. Ekraf	-	-	2	2	4
5	Bidang SDM Pariwisata	-	-	1	2	3
TOTAL						24

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa PNS dilingkungan Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim sebagian besar adalah Golongan III sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 6 orang. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh Pegawai Golongan III bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim
Menurut Pendidikan

No	Unit Wilayah	Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	1	1	6	1	9
2	Bidang Destinasi	-	1	1	2	4
3	Bidang Pemasaran	-	-	3	1	4
4	Bidang Pengembangan Ekraf	-	-	3	1	4
5	Bidang SDM Pariwisata	-	-	2	1	3
TOTAL						24

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim didominasi dengan tingkat Sarjana (S.1) yaitu sejumlah 15 orang, pendidikan Magister (S.2) sebanyak 6 orang sedangkan pendidikan Diploma sebanyak 2 orang sedangkan pendidikan SMA hanya 1 orang, hal ini menunjukan bahwa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami permasalahan dibidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pendidikan formal maupun non formal guna meningkatkan komposisi SDM di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim
Menurut Peta Jabatan

No	Jabatan/Eselon	Unit					Jumlah
		Sekretariat	Bidang Destinasi	Bidang Pemasaran	Bidang Peng. Ekraf	Bidang SDM Pariwisata	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi / Eselon II	1	-	-	-	-	1
2	Jabatan Administrator	1	1	1	1	1	5
3	Jabatan Pengawas / Eselon IV	1	-	-	-	-	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	2	2	2	3	2	11
5	Jabatan Fungsional Umum	4	1	1	-	-	6
TOTAL							24

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan peta jabatan PNS dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim masih kekurangan Jabatan Fungsional Umum atau pelaksana oleh karena itu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih harus mengusulkan penambahan pegawai melalui BKPSDM Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2.5
Komposisi PNS Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara
Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	1	2	3	2	9
2	Bid. Destinasi	-	-	2	1	-	-	1	4
3	Bid. Pemasaran	-	-	-	-	2	1	1	4
4	Bid. Peng. Ekraf	-	-	-	-	1	-	3	4
5	Bid. SDM Pariwisata	-	-	-	-	-	1	2	3
TOTAL									24

Berdasarkan tabel di atas, dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim yang didominasi usia >50 Tahun ke atas sebanyak 9 orang, usia 46-50 tahun sebanyak 5 orang, usia 41-45 tahun sebanyak 5 orang, usia 36-40 tahun 2 orang, usia 31-35 sebanyak 3 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2.6
Daftar Aset yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Muara Enim

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Filing Kabinet Besi	Baik	-	-	12
	Meja Kayu	Baik	-	-	9
	Kursi Besi	Baik			20
	Meja ½ Biro	Baik			4
	Kursi Putar	Baik			17
	A.C Split	Baik	-	-	9
	P.C Unit	Baik	-	-	15
	Printer	Baik	-	-	18
	Handycam	Baik			2
	Sepeda Motor	Baik			2
	Mobil	Baik			3
	Lemari Besi	Baik			3
	Lemari Es	Baik			2
	Dispenser	Baik			1
	Laptop	Baik	-	-	14

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan pembangunan sumber daya pembangunan dalam perspektif Renstra – PD, Kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program / kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim terus menerus melakukan peningkatan pelayanan terkait dibidang dimaksud.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir (2019-2023) antara lain :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Objek Wisata Air Terjun Curup Tenang di Desa Bedegung.
2. Pelatihan pengelola dan pelaku pariwisata

3. Mengikuti Event-event / Pameran baik dalam dan luar kabupaten
4. Pelatihan pembuatan kain sibori dan ecoprint
5. Workshop ekonomi kreatif

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi	Target Renstra					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Target Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Kunjungan Wisatawan	20%	30%	30%	30%	30%	20%	10%	25%	30%	-	30%
2	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif	20%	20%	20%	20%	25%	20%	10%	18%	20%	-	25%

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2022, pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan dikarenakan Virus Covid -19 yang melanda dunia termasuk Indonesia khususnya Kabupaten Muara Enim.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2019-2023.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Anggran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2019	5.308.283.211,09	4.848.192.770,-	91
2	2020	8.480.092.000,95	8.381.741.739,-	91
3	2021	9.802.544.852,00	8.350.440.816,-	85,19
4	2022	17.357.474.817,00	15.376.779.748	88,59
5	2023	14.774.600.527,-	-	-

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim sudah cukup baik, namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi masih sangat tinggi. Dapat dijelaskan beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2022 antara lain :

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2019 sampai 2022 pada belanja Pegawai rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi baik, masih dikategorikan wajar
2. Pada tahun 2021 antara realisasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran akibat dampak dari wabah penyakit Covid – 19 yang melanda dunia termasuk kabupaten Muara Enim.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran, outcome program, maupun output kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode, penyusunan perencanaan anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategi sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical success factor*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi.

Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan dikembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak terpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal ini secara umum meliputi 3 kategori, yaitu pertama input yang mencakup sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata seperti sumber daya manusia, kemampuan ekonomi daerah, sumber daya teknologi, kedua proses kerja dan ketiga kinerja yang menunjukkan pada hasil yang dicapai dengan perkembangan dari waktu ke waktu.

a. Input (masukan)

- Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar umat manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada satu sumber, yakni sumber daya manusia. Dilihat dari perspektif sumber daya manusia pendukung pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim maka dapat dikatakan bahwa jumlah yang ada belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

- Sumber daya Ekonomi

Sumber daya ekonomi dalam hal ini dilihat dari kemampuan pembiayaan atau kemampuan anggaran. Walaupun banyak pihak mengatakan bahwa persoalan anggaran merupakan sebuah persoalan anggaran merupakan sebuah persoalan klasik yang sering dijadikan alasan pembenar baik buruknya kinerja organisasi namun harus diakui pula bahwa bagaimanapun juga aktivitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada seberapa besar dukungan anggaran yang dikelola. Bila dilihat dari kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tersedia belum memadai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang direncanakan untuk

meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.

- Sumber Daya Teknologi

Dewasa ini seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, perlu dimanfaatkan dalam mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan pengelolaan database kepariwisataan, promosi kepariwisataan kedepan sebaiknya dapat diformulasikan sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terkait dengan ini, organisasi perlu untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada

- Kompetensi

Dilihat dari otoritas yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim. Pada dasarnya memiliki kewenangan dan peran yang besar. Namun dalam implementasinya terkadang masih mengalami kesulitan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan Dinas dari sisi kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, harus diakui bahwa masih mengalami kekurangan tenaga, keahlian dan keterampilan, khususnya dalam bidang penanganan dan pengembangan pariwisata daerah.

b. Proses Kerja

Proses kerja disini menyangkut bagaimana pola hubungan kerja antar bidang maupun dengan unit organisasi yang terkait. Termasuk bagaimana pola komunikasi antar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim PD terkait. Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organisasi dapat dikatakan bahwa mekanisme kerja yang terjadi sudah berjalan cukup baik. Dalam arti setiap bidang dapat menginterpretasikan job discription dan melaksanakannya secara terakomordir.

Walaupun harus diakui bahwa untuk meningkatkan kinerja secara secara lebih optimal masih diperlukan adanya evaluasi terhadap struktur dan job discription yang ada. Sedangkan dalam perspektif pola hubungan dengan unit/PD terkait seperti halnya dengan pola umum yang terjadi dalam organisasi birokrasi yang cenderung merefleksikan ego sektoral. Dimana unit kerja lebih berorientasi pada kepentingan internal secara parsial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit belum mendasarkan pada pendekatan system. Kecendrungan ini sering menghambat timbulnya diskresi dan indenpendensi unit untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

2. Lingkungan eksternal

a. Aspek ekonomi

Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi sangat berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Bagaimana pun juga pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya tanpa peran serta masyarakat, baik dalam konteks

masyarakat sosial maupun sektor swasta. Oleh karena itu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dapat merupakan dukungan yang sangat positif, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. Kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggi akan membuka peluang bagi peningkatan kemampuan investasi, demikian halnya sektor swasta yang sehat dan profitable akan memberikan peluang yang sangat besar dalam hal kerja sama dengan pemerintah daerah.

b. Aspek sosial budaya

Perubahan sosial dan budaya yang terjadi menggambarkan adanya perubahan pola pikir, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Hal ini akan sangat berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan adalah terjadinya perubahan sosial dan budaya, dalam arti perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Implementasi dari kemampuan yang dicapai salah satunya tercermin dari adanya perubahan preferensi, pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai fenomena dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki diskresi yang besar dalam menentukan pilihan – pilihan aktivitas. Disinilah letak tuntutan yang harus direspon oleh pemerintah daerah agar dapat menetapkan kebijakan dibidang pariwisata. Sehingga tetap memiliki kredibilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Aspek wisatawan

Dalam setiap bentuk usaha faktor pelanggan merupakan faktor penting yang turut menentukan eksistensi usaha akan sangat ditentukan oleh ketahanan dari pelanggan. Dan ketahanan pelanggan akan sangat tergantung dari pelayanan yang diberikan. Dalam konteks kajian terhadap Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim memiliki pelanggan yang terdiri dari pengusaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, wisatawan lokal, domestik, dan wisatawan manca negara. Pemerintah daerah dalam hal ini senantiasa menjaga kepuasan wisatawan (pelanggan) yang berkunjung ke Kabupaten Muara Enim.

d. Daerah lain sebagai kompetitor

Kompetitor dalam hal ini adalah daerah yang terus berbenah untuk meningkatkan daya tarik daerahnya. Seperti disadari bersama dengan adanya kebijakan otonomi daerah memacu diri untuk mengembangkan daerahnya. Upaya pengembangan ini dilakukan dengan eksplorasi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Kenyataan ini telah mendorong setiap daerah untuk menyusun strategi agar dapat memberikan pelayanan dan dapat memberikan fasilitas maupun insentif terhadap masyarakat dan pengusaha.

e. Kerjasama

Kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama dengan berbagai pihak terutama unit-unit kerja yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja dan manajemen. Kolaborasi yang sistematis dan sinergis dari berbagai unit kerja yang ada akan sangat mendukung peningkatan kinerja. Akan tetapi melihat kondisi yang berkembang saat ini, kenyataannya masih merefleksikan adanya kecenderungan pola kerja yang bersifat parsial dan tidak terintegrasi antar unit. Kedepan hal ini tentu harus mendapat perhatian yang lebih serius dan dicarikan penyelesaian masalahnya.

Lebih lanjut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam peningkatan pelayanan antara lain :

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan aparatur dalam mendata dan mengelola objek wisata yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Muara Enim
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengembangan objek dan potensi wisata yang berpedoman Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional
3. Pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan (KORWAS) bidang pariwisata Kabupaten Muara Enim sebagai langkah proaktif dalam mengawasi dan membina berbagai usaha-usaha ke pariwisata Kabupaten Muara Enim.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dalam mengembangkan pelayanan berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (faktor kunci keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi – instansi terkait dalam rangka penegakan hukum pada usaha-usaha yang terkait kepariwisataan di Kabupaten Muara Enim.
2. Mendorong DPRD Kabupaten Muara Enim melalui form Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian masalah-masalah terkait pengembangan daerah
3. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri
4. Senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder bidang kepariwisataan di Kabupaten Muara Enim dalam rangka menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Muara Enim.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan merupakan langkah strategis bagi perangkat daerah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan supaya perangkat daerah dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi kepala daerah. Sedangkan isu-isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa mendatang.

Penetapan isu-isu strategi dapat dilakukan setelah melihat lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Provinsi maupun Nasional. Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi yang memiliki dampak signifikan perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu sebagai mesin ekonomi penghasil devisa dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi di suatu destinasi pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2019-2022), analisis permasalahan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dapat ditemukan beberapa permasalahan antara lain :

1. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi yang masih belum optimal

- a. Kemacetan dan lahan parkir yang masih terbatas serta adanya premanisme;
- b. Sistem keamanan terpadu yang belum maksimal
- c. Sarana dan fasilitas pada destinasi yang belum maksimal
- d. Wadah untuk pelaku ekonomi kreatif yang masih belum tertata dengan maksimal dalam memasarkan hasil produknya;

- e. Event pariwisata yang harus dikemas lebih baik
 - f. Tata kelola Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang belum maksimal
- 2. Pengembangan dan Produktivitas Promosi atau Pemasaran yang belum Maksimal**
- a. Analisis pasar yang belum maksimal
 - b. Perlu adanya rebranding dan pemberian citra pariwisata Kabupaten Muara Enim
 - c. Belum optimalnya pemasaran yang terintegrasi
 - d. Promosi pariwisata yang belum terukur
 - e. Pemasaran yang belum berbasis teknologi informasi
 - f. Variasi produk bahan promosi
- 3. Pengembangan Industri Pariwisata yang belum maksimal dan optimal**
- a. Jumlah pusat informasi masih terbatas
 - b. Kerjasama antara pengelola usaha yang belum optimal
 - c. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang belum maksimal.
- 4. Kelembagaan dan SDM Pariwisata yang belum berstandar dan terintegrasi**
- a. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi semakin ketat sehingga meningkatkan kompetensi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia dan dunia usaha
 - b. Adanya kesepakatan ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dan kawasan
 - c. Masih kurangnya tenaga kerja dibidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat profesi (LPS)
 - d. Masih kurangnya lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kabupaten Muara Enim, maka dapat diringkas pemetaan permasalahan seperti pada tabel.

Tabel.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Indikator Kinerja Utama

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian	Belum optimalnya pengembangan dan penataan destinasi wisata	Masih kurangnya perencanaan yang komprehensif untuk pengembangan dan penataan destinasi pariwisata
			Belum terintegrasinya pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
			Belum optimalnya kreasi dalam menciptakan nilai tambah industri pariwisata berbasis IPTEK
			Masih rendahnya nilai investasi dan

			akses pembiayaan secara merata diindustri pariwisata dan ekonomi kreatif
			Masih rendahnya tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan kemitraan dengan pelaku usaha	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
			Belum optimalnya sinergi kerjasama antara pelaku bisnis wisata, masyarakat dan pemerintah
2.	Masih rendahnya pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	Masih sedikitnya pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HaKI dan sertifikat kompetensi	Masih terbatasnya SDM industri pariwisata, baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi
			Masih rendahnya perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual (HaKI)
			Belum optimalnya kelembagaan pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif
			Kelembagaan pariwisata yang belum berstandar dan terintegrasi

3.2. Telaahan Visi, Misi Pembangunan Daerah

Penelaan Visi, misi pembangunan daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun kedepan sebelum periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim yang tetuang dalam RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, maka Rentra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang tercantum dalam RPJPD tahun 2005-2025.

Visi Pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 adalah :

1. Visi Sehat diwujudkan melalui misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani
 - b. Mewujudkan masyarakat yang sehat rohani
2. Visi Mandiri diwujudkan melalui misi sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal
 - b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas
 - c. Mewujudkan lembaga pemerintahan yang baik
 - d. Mewujudkan perekonomian yang mempunyai daya saing tinggi
3. Visi Sejahtera diwujudkan melalui misi sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi hak-hak dasar
 - b. Mewujudkan masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri

Berkaitan dengan visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan dibidang Kepariwisata, memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Muara Enim selama lima tahun ke depan. Oleh karena posisi yang penting dan strategis tersebut maka kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim harus terus dioptimalkan maka diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim.

Renstra memiliki hubungan yang sangat erat dengan RPJMD / RPJPD yang keduanya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja rencana strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD. Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah tahun 2024-2026. Secara umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki kontribusi dalam mendukung pencapaian **Visi Mandiri dan Misi Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal.**

Melalui misi Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal, diharapkan mampu **mewujudkan Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera.** Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muara Enim.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim mewujudkan tujuan pembangunan yaitu Meningkatkan Pembangunan Pariwisata. Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam renstra tersebut maka didukung oleh 2 sasaran pembangunan yaitu (1) Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah (2) Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif dengan 3 indikator sasaran renstra : (1) Persentase Kunjungan Wisatawan (2) Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (3) Jumlah Pelaku Ekonomi yang Memiliki HaKI.

Mengingat kaitan yang erat antara Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dengan Dokumen Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka dalam

penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupten Muara Enim. harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah dicantumkan dalam target Kinerja Rencana Pembangunan Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan

A. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024

1. Visi Kemenparekraf/Baparekraf

Visi merupakan kondisi yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2024. Visi hendaknya memiliki sebuah fokus masa depan yang jelas dan disepakati bersama. Dalam perumusannya, penentuan visi sebaiknya tidak terjebak pada capaian saat ini, namun kondisi saat ini tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan visi. Visi harus realistis dan memperlihatkan keunggulan organisasi, serta menimbulkan rasa bangga dan menguguh semangat bagi seluruh ASN Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan arah Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1(satu) visi. Yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah :

“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini selaras dan mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi Kemenparekraf/Banparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama yaitu :

1. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju
2. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan
4. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak tertinggal dibanding dengan negara lain.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata. Indonesia harus

menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun

Ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu orignalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif.

2. Misi Kemenparekraf/Baparekraf

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5(lima) tahun ke depan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkualitas
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap **misi nomor 2** yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing**. Oleh karena itu maka **misi kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif**.

Kemenparekraf / Banparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila, melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia. Dalam menyambut era industri 4.0, Kemenparekraf / Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan Kemenparekraf / Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama 2020-2024.

Selain itu, Kemenparekraf / Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf / Baparekraf.

3. Tujuan Kemenparekraf / Baparekraf

Berdasarkan Visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf / Baparekraf khususnya bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goals*) Kemenparekraf / Baparekraf. Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tujuan Kemenparekraf / Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional” pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator :

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

B. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan telaahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata
2. Pelestarian kebudayaan daerah untuk memperkokoh jati diri
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas objek wisata dan daya tarik wisata
4. Peningkatan sumber daya manusia yang profesional dibidang kepariwisataan dan budaya
5. Meningkatkan minat kunjungan wisata ke Kota Palembang.

Setelah ditelaah dan diteliti Renstra baik dari kementerian maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan selaras atau sinkron dengan renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kebijakan spasial yang mengarahkan struktur dan pola ruang Kabupaten Muara Enim hingga Tahun 2032. RTRW menafsirkan arahan pembangunan yang ditetapkan oleh RPJPD dan RPJMD ke dalam ruang supaya kondisi yang dicita-citakan dalam kebijakan tersebut dapat terwujud. Tujuan penataan ruang Kabupaten Muara Enim adalah “ *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Muara Enim melalui Pengembangan Sektor*

Agro dan Energi Berteknologi tinggi dengan Bersendikan pada Solidaritas Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Hidup.”

Rencana struktur ruang menetapkan Muara Enim sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW ini didukung oleh Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pusat-pusat permukiman yang direncanakan berperan sebagai PKL adalah : Ibu kota Kecamatan Lawang Kidul sebagai pusat pertumbuhan satelit Muara Enim dan merupakan daerah belakang dari Kabupaten Muara Enim. Pada Rencana Kawasan Strategis, PKW Kota Muara Enim ditetapkan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, tepatnya berupa kawasan perdagangan dan jasa dengan rencana pengembangan kawasan sebesar kurang lebih 100 hektar. Kecamatan lawang kidul meski tidak ditetapkan sebagai kawasan strategis, saat ini merupakan kawasan penghasil batubara di Kabupaten Muara Enim.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip. Sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identitas isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, telaahan terhadap visi dan misi RPD,

telaahan terhadap RTRW dan KLHS, serta telaahan terhadap isu-isu strategis Kabupaten Muara Enim dalam RPD, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan isu strategis pada rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan penetapan kawasan ojek wisata tertatah dan terkelola dengan baik sesuai potensi daya tarik wisata yang ada Kabupaten Muara Enim
2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona dan Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Muara Enim
3. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan
4. Belum maksimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Muara Enim karena masih banyaknya pelaku-pelaku usaha pariwisata yang mengelola usahanya tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama sebagai SDM kreatif dan inovatif yang berbasis dan berakar pada budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menuntut pengelolaan secara profesional dan memenuhi standar kompetensi nasional sektor pariwisata
6. Adanya kebijakan wisata halal yang berdaya saing diperlukan adanya standarisasi dan aturan-aturan bagi pelaku wisata, seperti hotel, restoran/rumah makan, travel/biro wisata lainnya yang sesuai dengan ketentuan Islam.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuannya adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPD Tahun 2024-2026 serta disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Perangkat Daerah sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi dan target yang ingin dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

Terkait dengan tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai maka tujuan dari Rencana Awal RENSTRA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim adalah untuk mendukung Misi RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 yakni :

1. Meningkatnya Pembangunan Pariwisata (Misi Ke 1 : Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal)

sedangkan untuk mendukung tercapainya tujuan dari RENSTRA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 maka sasaran yang menjadi fokus untuk pencapaian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah :

1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah
2. Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim serta indikator kinerja yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Muara Enim

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja/Sasaran tahun		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pembangunan Pariwisata		Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	0,05	0,06	0,07
		Meningkatnya daya Saing Pariwisata Daerah	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	40.000 orang 2 Hari	45.000 orang 2 Hari	50.000 orang 2 Hari
		Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif	3. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki HaKI	20 Orang	20 Orang	20 Orang

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan dari suatu perencanaan. Strategis dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Berbagai rumusan strategi yang menunjukkan kemantaban perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisiensi sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya – upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun Renstra merupakan bagian dari kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian tujuan yang harus dilaksanakan sesuai denganketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi pembangunan daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dalam lima tahun mendatang. Dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Muara Enim

Visi : Mandiri				
Misi ke 1 : Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Pembangunan Pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Muara Enim dengan kearifan lokal - Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi Kreatif - Meningkatkan tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif - Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintergrasi - Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah industri pariwisata berbasis IPTEK
		Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HaKI	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HaKI) - Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual (HaKI) - Perluasan pangsa pasar dan diverifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, yakni periode Renstra Tahun 2024-2026 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, indikator kinerja yang ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim dalam 3 (tiga) tahun mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel.7

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			2024	2025	2026	
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	15.000 orang	40.000 orang	45.000 orang	50.000 orang	50.000 orang
2.	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan	1 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari
3.	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HaKI	10 orang	20 orang	25 orang	30 orang	30 orang

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 disusun sebagai amanah dalam rangka menindaklanjuti RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026. Rencana Strategis ini menjelaskan dan memberikan informasi yang mencakup program-program pengembangan kepariwisataan dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun dari tahun 2024 hingga tahun 2026 dengan menelaah permasalahan-permasalahan pembangunan pariwisata di Kabupaten Muara Enim dan langkah-langkah strategis untuk pemecahan masalah.

Keberhasilan pembangunan pariwisata di Kabupaten Muara Enim, tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak, bukan saja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetapi juga masyarakat, sektor swasta dan stakeholder lainnya. Selain itu kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan instansi -instansi baik vertikal maupun horizontal yang ada dibutuhkan dalam upaya menjadikan Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera. Serta mewujudkan pariwisata Kabupaten Muara Enim yang berdaya saing. Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam pengembangan pariwisata, sehingga tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Muara Enim demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Muara Enim**



ISDRIN, ST
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 196909141996031002